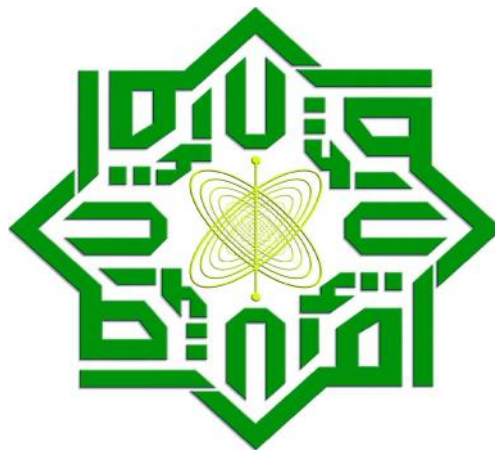


**ANALISIS BESARNYA ASET, *LEVERAGE* DAN JENIS INDUSTRI
TERHADAP KETAATAN EMITEN DALAM MENERAPKAN
ATURAN *BOARD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Komprehensif Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

JASAL ARAFAT
NIM : 10773000082

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2012

ABSTRAK

ANALISIS BESARNYA ASET, *LEVERAGE* DAN JENIS INDUSTRI TERHADAP KETAATAN EMITEN DALAM MENERAPKAN ATURAN *BOARD GOVERNANCE*

**Oleh :
JASAL ARAFAT**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah besarnya aset, leverage dan jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan board governance. Aset, leverage dan jenis industri sebagai variabel independen sedangkan ketaatan emiten sebagai variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 190 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2010. Alat analisis menggunakan regresi logistik dengan menggunakan program SPSS. Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menganalisis data sekunder yang diperoleh dari ICMD (Indonesia Capital Market Directory) selama tahun 2010 dan Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menyatakan bahwa : (1) Besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan board governance. (2) Leverage tidak berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan board governance. (3) Jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan board governance.

Kata kunci: board governance, aset, leverage, jenis industri

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS BESARNYA ASET, *LEVERAGE* DAN JENIS INDUSTRI TERHADAP KETAATAN EMITEN DALAM MENERAPKAN ATURAN *BOARD GOVERNANCE*”.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.M. Nazir Karim selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru beserta seluruh staf-stafnya.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak selaku Penasehat Akademis dan ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta sabar untuk memberikan bimbingan.

5. Bapak Albafery, SE, M.Ec selaku pembimbing II yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.
6. Bapak dan Ibu dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
7. Ayahanda Idris Sumo dan Ibunda Irus tercinta yang berkorban dan berdo'a agar ananda menjadi orang yang berguna, serta dapat mewujudkan cita-cita.
8. Kakak dan kedua adiku tercinta yang menjadi motivasi untuk penulis.
9. Sahabat terbaik penulis Jusna Lestari, Herman, Supardi, Radiarni, M. Nur, Zulvandri, Alva Zuchri yang selalu memberikan semangat buat penulis.
10. Teman-teman Akuntansi lokal A '07 Rahman, Ijaz, Wak Edi, Toha, Julius, Firda, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon, semoga segala usaha dan jasa semua pihak dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga pembaca dapat memberikan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga ada manfaatnya.

Pekanbaru, 20 Mei 2012

PENULIS

JASAL ARAFAT

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
 BAB II : TELAAH PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
C. Pandangan Islam	22
D. Kerangka Konseptual	24
E. Model Penelitian	25

F. Hipotesis	26
--------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Populasi Penelitian	29
B. Sampel Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	30
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Identifikasi dan Pengukuran Variabel	31
F. Metode Analisis Data	38

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	48

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Kriteria Sampel Penelitian	30
Tabel 3.2. Kategori Ketaatan Emiten.....	32
Tabel 3.3. Kategori Aset Emiten.....	34
Tabel 3.4. Kategori <i>Leverage</i> Emiten	36
Tabel 3.5. Kategori Jenis Industri Emiten.....	37
Tabel 4.1. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan Aset	41
Tabel 4.2. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan <i>Leverage</i>	41
Tabel 4.3. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan Jenis Industri	42
Tabel 4.4. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan <i>Board Governance</i>	42
Tabel 4.5. <i>Hosmer dan Lomeshow's Test Goodness of Fit Test</i>	43
Tabel 4.6. Tabel Klasifikasi	44
Tabel 4.7. Tabel <i>Iteration History -2 Log Likelihood</i>	45
Tabel 4.8. Uji koefisien Regresi <i>Variable in the Equation</i>	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyebab krisis ekonomi yang terjadi di negara Asia yang masih terasa dampaknya hingga saat ini adalah akibat buruknya tata kelola perusahaan atau *corporate governance*. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan negara lain bukan hanya disebabkan faktor ekonomi makro namun juga karena lemahnya *corporate governance* yang ada di negara-negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas (Kusumawati dan Riyanto, 2005).

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. (Nasution, Marihot dan Setiawan, 2007). *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Pentingnya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) masih menjadi fokus utama

dalam pengembangan iklim usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk memenuhi tuntutan pasar, pihak regulator Indonesia, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), berupaya memperbaiki *corporate governance* perusahaan-perusahaan Indonesia. Hal itu antara lain dituangkan dalam *code for good corporate governance* dan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan atau *corporate governance*, yaitu Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339./BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Ini menunjukkan bahwa teori mengenai *board governance* tidak terlepas dari teori mengenai *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Hadirnya *good corporate governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat *good corporate governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi (Hastuti, 2005).

Menurut Kusumawati dan Riyanto (2005), *good corporate governance* tidak saja berakibat positif bagi pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah

berbagai lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund* sangat berkepentingan terhadap penegakan *coporate governance* di Negara-negara penerima dan karena mereka menganggap bahwa *corporate governance* merupakan bagian penting dari sistem pasar yang efisien.

Respon terhadap kebutuhan pembentukan Sistem *Good Corporate Governance* pada beberapa tahun ini sangat tinggi, hal ini belajar dari pengalaman akibat banyaknya organisasi yang memiliki kinerja yang sangat tidak mengembirakan, di samping itu tidak efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi yang tidak saja melanda *profit organisation* tetapi juga *non-profit organisation* tidak terkecuali institusi pemerintah (Husnan, 2001).

Pedoman *good corporate governance* disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) pada tahun 2002 dengan tujuan agar pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksanaan *good corporate governance* oleh pelaku usaha di Indonesia. Apabila praktik-praktik *good corporate governance* sesuai dengan KNKCG, maka dapat membantu manajer dalam penggambaran tingkat *compliance* mereka terhadap *good corporate governance* (Kusumawati dan Riyanto, 2005). Untuk memperbaiki kerangka implementasi *good corporate governance*, kemudian muncul apa yang disebut dengan *board governance*.

Board governance adalah tata kelola dari anggota dewan atau pimpinan yang sesuai dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339./BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Sesuai dengan

peraturan yang dikeluarkan oleh direksi Bursa Efek Jakarta. Peraturan tentang *board governance* merupakan suatu bentuk upaya dari pemerintah sebagai pihak regulator untuk memperbaiki *corporate governance* di Indonesia, terutama pasca krisis ekonomi tahun 1997.

Ketaatan terhadap *board governance* adalah seberapa taat para emiten terhadap aturan yang ditetapkan tentang keberadaan *board governance*. Rendahnya kesadaran emiten untuk menerapkan aturan *board governance* karena aturan tersebut bersifat himbauan dan tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak regulator (Nuryana 2004). Fenomena ketaatan terhadap *board governance* masih jarang untuk diteliti karena masih bersifat tidak wajib pada saat periode pengamatan sampel (tahun 2010) dan tidak dikenai sanksi.

Annisa (2010) dengan menggunakan sampel 178 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2008 menyimpulkan bahwa besar aset dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *bord governance*.

Nuryanah (2004) meneliti bahwa variabel industri mampu menerangkan secara signifikan tingkat responsivitas emiten dalam menerapkan aturan *board governance* berkaitan dengan struktur dan komposisi *board governance*. sedangkan variabel besarnya aset tidak mampu menerangkan secara signifikan tingkat responsivitas emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adams dan Mehran (2003) dalam Annisa (2010) berkaitan dengan struktur *corporate governance* pada industri bank dan manufaktur menyimpulkan bahwa *governance structures* di antara kedua industri

tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur *corporate governance* adalah spesifik industri. Perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan *investment opportunities* sebagaimana adanya perbedaan regulasi.

Penelitian ini merefleksikan pada penelitian Annisa (2010), dengan objek penelitian perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berusaha menyelidiki ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* serta menguji variabel-variabel yang mempengaruhi seperti besarnya aset dan jenis industri. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan *leverage* sebagai variabel yang mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*, karena dalam penelitian Rika Susanti (2010) *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang mana dalam penelitian Nuryana (2004) *board governance* berhubungan secara signifikan dengan nilai perusahaan serta mempengaruhi nilai perusahaan. Lebih jauh lagi, Hartzell dan Starks (2003) dalam Nuryanah (2004) menyatakan *leverage* merupakan faktor keadaan didalam perusahaan yang mempengaruhi praktik *corporate governance*.

Dengan penelitian ini apakah variabel besarnya aset, *leverage*, dan jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*, dengan menggunakan data yang berbeda, jumlah sampel yang lebih banyak dan juga tahun yang lebih baru yaitu tahun 2010.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penelitian ini mengangkat judul tentang **“ANALISIS BESARNYA ASET, *LEVERAGE*, DAN JENIS INDUSTRI TERHADAP KETAATAN EMITEN DALAM MENERAPKAN ATURAN *BOARD GOVERNANCE* ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah jenis industri perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris tentang variabel besarnya aset terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Memperoleh bukti empiris tentang variabel *leverage* perusahaan terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Memperoleh bukti empiris tentang variabel jenis industri terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat membuat efektifitas aturan *board governance* yang akan berdampak pada semakin baiknya tata kelola perusahaan dan kemudian bisa berdampak pada peningkatan penciptaan nilai perusahaan.
2. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis tentang ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagi peneliti yang akan datang, semoga dapat dijadikan acuan pada penelitian berikutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini, landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data serta interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam rangka memahami *corporate governance* maka digunakanlah dasar perspektif hubungan keagenan. (Jensen dan Meckling, 1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan, inilah yang merupakan dari *agency theory*. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal yang sulit diwujudkan. Maka dari itu, pemilik diwajibkan untuk memberi hak kepada manajer yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu.

Teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi (Eisenhardt, 1989), yaitu: asumsi sifat manusia (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), dan asumsi informasi (*information assumptions*). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) *self-interest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, (2) *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3)

risk aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) konflik sebagian tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli. Teori keagenan lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisien dalam hubungan pemilik dengan agen. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*, ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* sebaliknya, *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2001).

2. Ketaatan emiten terhadap *Board Governance*

Ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* adalah seberapa taat para emiten terhadap peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal (Pasal 1 angka 6 UU No.8/1995) dalam Aritonang (2008).

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), berupaya memperbaiki *good corporate governance* perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan membuat *Code for Good Corporate Governance* dan peraturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan, yaitu Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-339./BEJ/07-2001 butir C mengenai *board governance* yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan tercatat wajib memiliki:

- a) Komisaris Independen, yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota komisaris.
- b) Komite Audit, yang keanggotaannya sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan seorang diantaranya merupakan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit.
- c) Sekretaris Perusahaan, yang dilaksanakan oleh salah seorang direktur atau pejabat Perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan.

3. Aset Perusahaan

Menurut PSAK No.19 Tahun 2009 aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas.

Dengan semakin besarnya aset yang dimiliki maka kredibilitas perusahaan yang bersangkutan akan semakin baik, sehingga mengakibatkan atau berdampak pada semakin taatnya perusahaan tersebut dalam menaati aturan tentang *board governance* (Annisa, 2010).

Perusahaan dengan aset yang semakin besar memiliki kecenderungan untuk semakin menaati peraturan *board governance* karena sebagai emiten mereka ingin memiliki citra yang baik dan cenderung menaati peraturan *board governance*.

4. Leverage

Secara sepintas istilah *leverage* digunakan untuk menunjukkan derajat penggunaan hutang, ataupun untuk menyatakan struktur perusahaan. *Leverage* adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. *Leverage* dibagi menjadi dua yaitu *leverage* operasi (*operating leverage*) dan *leverage* keuangan (*financial leverage*). *Leverage* operasi menunjukan suatu indikator perubahan laba bersih yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan sedangkan *leverage* keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan *equity* yang dimilikinya.

Dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah *return* yang akan diperoleh. Tingkat *leverage* ini bisa saja berbeda-beda antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke

periode lainnya didalam satu perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi resiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan. Istilah resiko (*risk*) disini dimaksudkan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam hubungannya dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban-kewajiban tetapnya (*fixed payment obligation*) (Syamsuddin, 2004).

Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa tingkat *leverage* yang tinggi mengindikasikan resiko perusahaan yang tinggi pula, maka *stakeholder* (kreditor) sering memperhatikan rasio ini dengan pemikiran perusahaan dengan penggunaan utang yang tinggi, otomatis akan dihadapkan pada kewajiban membayarkan beban tetap (pokok pinjaman dan bunga) yang tinggi pula dan pada kondisi perusahaan rugi atau pada posisi laba yang tidak terlalu tinggi maka kreditor akan dihadapkan pada resiko ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utangnya (*financial insolvency*). Karena itulah perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi akan cenderung untuk tidak mentaati peraturan yang bersifat himbauan dalam hal ini ketaatan dalam menerapkan aturan *board governance* dibandingkan perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah yang karena perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi dihadapkan pada kewajiban membayar kewajiban-kewajiban tetapnya (*fixed payment obligation*).

5. Jenis Industri

Menurut UU RI No 5 Tahun 1984 industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan

rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai macam komponen, baik itu komponen yang berasal dari alam maupun komponen yang berasal dari manusia sebagai sumber daya bagi industri. Hasilnya adalah berupa barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi kebutuhan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Adams dan Mehran, 2003 (dalam Annisa, 2010) berkaitan dengan struktur *corporate governance* pada industri bank dan manufaktur menyimpulkan bahwa *governance structures* di antara kedua industri tersebut sangatlah berbeda. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa struktur *corporate governance* adalah spesifik industri. Perbedaan tersebut bisa jadi disebabkan karena adanya perbedaan *investment opportunities* sebagaimana adanya perbedaan regulasi. Lebih jauh lagi, penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor industri perusahaan mempengaruhi *board strucure*.

6. Defenisi Corvorate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan komite Cadbury dalam Restie (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh

perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008).

7. Elemen-elemen *Corporate Governance*

Terdapat dua mekanisme dalam penerapan *good corporate governance* yaitu mekanisme intern dan mekanisme ekstern. Mekanisme intern berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan khususnya peranan dewan komisaris. Sedangkan mekanisme ekstern yaitu mekanisme kontrol memanfaatkan semua perangkat yang ada di luar perusahaan, baik ekonomi, hukum dan sosial untuk mengontrol jalannya perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Syahkhroza (2003) menyatakan secara tegas bahwa *corporate governance* terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu fokus kepada *board*, hukum dan perturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan, pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif (E3P), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

1. Fokus Kepada *Board*

Board adalah pucuk pimpinan suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pemakaian sumber daya agar selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam perusahaan Indonesia yang dimaksud dengan *Board* adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, hal ini sebagai konsekuensi Negara Indonesia telah mengadopsi dan

menggunakan sistem *Dual Board*. Sedangkan dalam konteks Institusi Pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan *Board* adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tataran yang lebih rendah lagi, yang dimaksud dengan *Board* adalah Kepala Daerah dan DPRD.

Good Corporate Governance harus fokus kepada *Board* karena dewan komisaris dan dewan direksi adalah yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang cara melakukan pengarahannya, pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan (Syahkhroza, 2003). Secara tegas bahwa *Good Corporate Governance* dapat dibangun dalam suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki *strategy* dan *planning* yang diimplementasikan secara terukur dari waktu ke waktu. Apabila *strategy* dan *planning* terukur secara jelas, maka akan mempermudah *Board* untuk mengukur dan memantau kinerja perusahaan secara berkesinambungan.

2. Hukum dan Peraturan Sebagai Alat Untuk Mengarahkan dan Mengendalikan.

Suatu organisasi membutuhkan suatu perangkat hukum dan peraturan yang ditujukan kepada *board* untuk melindungi dan memagari agar keputusan yang dibuat oleh *board* dapat *independent* dan pengelolaan sumber daya perusahaan dapat optimal. Pengertian hukum di sini bukan hanya perangkat hukum yang berasal dari luar perusahaan saja seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana, Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Perbankan, Standar Akuntansi, Peraturan Bapepam dan Pasar Modal dan sebagainya, tetapi juga produk hukum internasional perusahaan seperti Kebijakan Perusahaan, Prosedur

Standar Operasi dan sebagainya. Produk hukum dalam membangun *Good Corporate Governance* harus ditaati tanpa mengganggu *board* dan Manajemen Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Syahkhroza, 2003).

3. Pengelolaan sumber daya dengan kaidah E3P

Perangkat hukum dan peraturan yang ada digunakan untuk memberikan pedoman yang berisi petunjuk dan batasan kepada Board untuk bertindak lebih independent. *Board governance* yang baik tentu akan berupaya secara terus menerus untuk mengalokasikan sumber daya secara maksimal dalam kerangka pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya ini tentu saja harus memenuhi kaidah-kaidah efisien, efektif, ekonomis, dan produktif-E3P dengan selalu berorientasi kepada tujuan perusahaan. Steinberg dan Bromilow, 2000 dalam (Syahkhroza, 2003) menyatakan secara tegas bahwa *good corporate governance* akan bisa dibangun dalam suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki *strategy* dan *planning* (lazim disebut *strategic planning*) yang dapat diimplementasikan secara terukur dari waktu ke waktu.

4. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pada april 1999, OECD telah mengeluarkan seperangkat prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin, hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya dan lingkungan yang berbeda. Prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua Negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan atau nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana

diperlukan. Prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi lima hal sebagai berikut yaitu perlindungan terhadap pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan dan transparansi, dan akuntabilitas dewan komisaris (Darmawati, 2004).

a. Perlindungan terhadap Pemegang Saham

Good corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal. Kerangka yang dibangun dalam *good corporate governance* juga harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham.

b. Persamaan Perlakuan terhadap Seluruh Pemegang Saham

Kerangka *Good Corporate Governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berbeda dalam satu kelas, melarang praktek-praktek *insider trading* dan *self dealing* dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

c. Peranan *Stakeholder* yang Terkait dengan Perusahaan

Kerangka *good corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholder* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.

d. Peranan *Stakeholder* yang Terkait dengan Perusahaan

Good corporate governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang lebih baik untuk kepentingan *stakeholder*. Kerangka *good corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, seperti ditentukan dalam undang-undang dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholder* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.

e. Akuntabilitas Dewan Komisaris

Kerangka *good corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewewangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta pihak regulator Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

8. Cakupan *Board Governance*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *good corporate governance* fokus kepada *board* tentang pelaksanaan pengelolaan sumber daya organisasi dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi. (Nuryanah, 2004) menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki *board governance* yang baik maka perusahaan tersebut akan memiliki kinerja yang baik serta penciptaan nilai perusahaan yang baik pula. Apabila kinerja dan penciptaan nilai perusahaan yang baik telah tercapai maka akan terwujud perusahaan yang *good corporate governance*, dengan demikian *board governance* merupakan salah satu faktor input kunci untuk mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya mencapai tujuan organisasi.

Didukung oleh instrumen pengopersian secara jelas, yaitu dengan adanya *Best Practice* dan *Code of Conduct Corporate Governace*. Kedua instrument ini sangat penting bagi *board* agar mereka lebih dapat bertindak secara independen dalam mengelola sumber daya perusahaan, di samping kedua instrument tersebut, suatu perusahaan harus memiliki berbagai standar dan prosedur operasi yang baku untuk semua unit kerjanya. Hal ini penting dilakukan agar mekanisme pengendalian operasional menjadi lebih mudah sehingga tata kelola perusahaan menjadi lebih terkontrol. Perangkat-perangkat kebijakan dan peraturan juga diperlukan untuk memagari operasional perusahaan.

Agar mekanisme pengendalian internal maupun eksternal dapat efektif untuk dieksekusikan maka diperlukan suatu seperangkat pengukuran kinerja yang tidak hanya *board* tetapi juga manajemen dalam pemantauan kinerja. Dalam tahap *output*, biasanya mekanisme yang paling sering digunakan adalah melalui laporan keuangan. Pada saat ini laporan keuangan harus didukung oleh laporan non keuangan lainnya. Dalam konteks *strategic* manajemen, *good corporate governance* yang baik apabila *Board* berhasil mencapai tujuan akhir perusahaan

yaitu tidak hanya kepada pemuasan terhadap *shareholder* tetapi juga *stakeholder* lainnya yaitu, *costumers*, *suppliers*, *local community*, *government*, dan sebagainya (Syakhroza, 2003).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Gillan, Hartzell dan Starks (2003) dalam Augustine dan Amelinda (2005) juga menyatakan bahwa pemilihan struktur *corporate governance* dipengaruhi oleh *cost* dan *benefits* yang dihadapi perusahaan. Mereka juga menyatakan bahwa *industry's investment opportunities*, *product uniqueness*, *competitive environment*, *information environment*, dan *leverage* mampu menerangkan struktur *corporate governance*. Lebih jauh lagi, penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor industri dan perusahaan mempengaruhi *board structure*.

Penelitian Augustine dan Amelinda (2005) dengan menggunakan sample perusahaan manufaktur pada tahun 2003 menunjukkan bahwa emiten beraset kecil memiliki probabilitas untuk menerapkan aturan *board governance* lebih rendah dibanding emiten beraset besar.

Penelitian Syakhroza (2003) menyatakan bahwa faktor budaya dan sistem politik akan mempengaruhi perkembangan penerapan *corporate governance*. Darmawati juga menyatakan bahwa dengan adanya *corporate governance* yang semakin baik akan meningkatkan kinerja perusahaan

Siti Nuryanah (2004) menganalisis responsivitas perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEJ terhadap peraturan *board governance* yang di keluarkan oleh BEJ. Peneliti menemukan bahwa responsivitas ketaatan emiten yang terbagi

berdasarkan kategori industri terhadap aturan *board governance* berbeda secara signifikan.

Penelitian Rika susanti (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel *board size*, *board intensity (mettings)*, *board independence*, *profitabilitas*, dan *investment opportunity* terhadap nilai perusahaan.

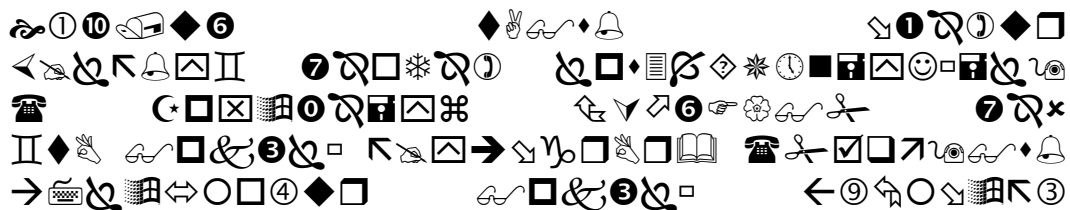
Annisa (2010) dengan menggunakan sampel 178 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2008 berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan jenis industri mempengaruhi ketaatan emiten terhadap aturan *board governance*.

C. Pandangan Islam

Islam adalah agama yang diridhoi dan disempurnakan oleh Allah SWT, artinya Islam bukan hanya agama yang mengatur tentang ibadah saja, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia juga diatur didalamnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam, dimana semua hal tentang kehidupan dan aturan-aturan *hablum minallah* dan *hablum minannaas* diatur didalamnya.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berhubungan dengan variabel penelitian ini, seperti:

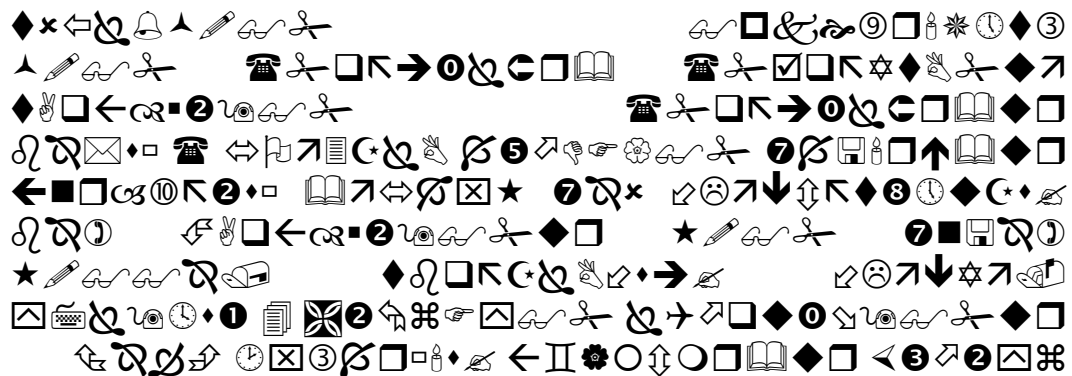
Surat Al Baqarah ayat 30:





Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Surat An Nisaa’ ayat 59:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Rasulullah bersabda yang artinya:

„ Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat”. (H.R.Bukhari Muslim).

Kedisiplinan dalam suatu pekerjaan merupakan kehendak dan kesediaan karyawan untuk memenuhi dan mentaati segala peraturan dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kedisiplinan kerja tidak akan terbentuk dengan sendirinya tanpa disertai upaya yang dilakukan oleh organisasi atau pemimpin. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan kerja tersebut adalah dengan menetapkan peraturan kerja yang jelas dan tegas, melakukan pengawasan yang cukup dan menjalin hubungan yang harmonis.

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja dan terwujudnya tujuan organisasi dan karyawan. Dengan demikian seorang pemimpin berusaha untuk mengarahkan bawahannya agar mempunyai disiplin kerja yang baik.

D. Kerangka Konseptual

Semakin besar aset perusahaan maka akan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* karena semakin besar aset berarti akan cenderung menjaga citra perusahaannya dimata publik sehingga akan semakin taat terhadap peraturan *board governance* maka akan membuat

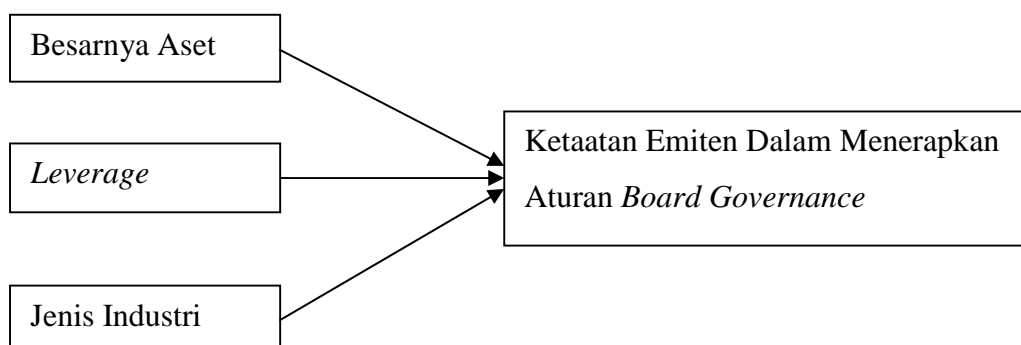
perusahaan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mentaati aturan *board governance*, sehingga implementasi *good corporate governance* pada perusahaan semakin baik, dan hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modal.

Semakin tinggi *leverage* maka akan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*, karena perusahaan dengan *leverage* tinggi dihadapkan pada kewajiban membayar kewajiban-kewajiban tetapnya (*fixed payment obligation*). Maka perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih memetingkan kewajiban-kewajibannya, sehingga untuk menerapkan aturan *board governance* yang mana dalam hal ini bersifat himbauan dan tanpa adanya sanksi yang tegas dari pihak regulator sering terabaikan.

Jenis industri yang berbeda juga akan mempengaruhi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* karena perbedaan karakteristik setiap jenis industri.

E. Model Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini maka akan digambarkan model penelitian sebagai berikut:



F. Hipotesis

1. Aset Perusahaan

Suwardjono (2005) menjelaskan bahwa besarnya aset merupakan besarnya sumber-sumber ekonomi perusahaan yang dilakukan dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Secara resmi besarnya aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomis di masa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas (PASK No.19 Tahun 2009).

Hasil penelitian Augustine dan Amelinda (2005) menunjukkan bahwa emiten beraset kecil memiliki probabilitas untuk menerapkan aturan *Board Governance* lebih rendah dibanding emiten beraset besar.

Jadi besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a1} = Besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Leverage

Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Tingkat *leverage* ini bisa saja berbeda-beda antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya,

atau dari satu periode ke periode lainnya didalam satu perusahaan (Syamsuddin, 2004)

Penelitian Rika susanti (2010) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2005 sampai 2008 menyimpulkan bahwa *leverage* mempengaruhi nilai perusahaan. Nuryanah (2004) dengan menganalisis hubungan *board governance* terhadap penciptaan nilai perusahaan, dengan sampel perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) juga menyimpulkan bahwa nilai perusahaan lebih dipengaruhi oleh faktor komposisi dan struktur *board governance*. Lebih jauh lagi Nuryanah (2004) juga menyatakan bahwa struktur *board governance* dipengaruhi oleh faktor diluar perusahaan dan faktor didalam perusahaan. Faktor-faktor diluar perusahaan antara lain *industry*, *legality*, aturan mengenai *shareholder rights*, *competitive environment*, *information environment* dan faktor-faktor didalam perusahaan seperti *cost* dan *benefits*, *judicial efficiency*, *growth opportunities*, *intangible assets*, *product uniqueness*, dan *leverage*.

Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya *leverage* berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a2} = *leverage* berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Jenis Industri

Menurut UU RI No 5 Tahun 1984 industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai macam komponen, baik itu komponen yang berasal dari alam maupun komponen yang berasal dari manusia sebagai sumber daya bagi industri. Hasilnya adalah berupa barang atau jasa yang memiliki nilai guna bagi kebutuhan manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2010) dengan sampel 178 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008, menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jenis industri perbankan, lembaga kredit dan asuransi, lebih cenderung menerapkan aturan *board governance*.

Jadi jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a3} = Jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009).

Populasi pada penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010.

B. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2009).

Perusahaan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 dan menerbitkan laporan keuangan dalam *Indonesian Capital Market Directory*. Alasannya adalah menggunakan data dengan tahun terbaru (tahun 2010) supaya data *up to date*, selain itu periode tahun 2010 merupakan periode sedang terjadinya krisis global, sehingga dengan adanya krisis global tersebut, hal ini mungkin akan memicu para emiten untuk semakin taat dalam menerapkan prinsip *board governance* karena untuk menarik investor supaya menanamkan modalnya atau investasinya pada perusahaan yang bersangkutan.

Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria pada penelitian ini adalah:

1. Emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 yang telah memenuhi atau belum memenuhi aturan *board governance* (yaitu berkaitan dengan dewan komisaris dan komite audit) yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia.
2. Emiten-emiten tersebut telah menerbitkan laporan keuangan tahun 2010 yang tercantum dalam *Indonesian Capital Market Directory*.

Dari seluruh jumlah populasi yaitu 411 perusahaan, karena ada perusahaan dengan data yang tidak lengkap untuk dewan komisaris dan komite audit, serta perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahun 2010, maka sampel akhir yang diperoleh adalah 190 perusahaan, daftar nama perusahaan terlampir (Lampiran A).

Tabel 3.1. Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010	411
2	Perusahaan yang datanya tidak lengkap untuk dewan komisaris dan komite audit	(153)
3	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahun 2010 dalam <i>Indonesian Capital Market Directory</i>	(68)
	Jumlah sampel:	190

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Pusat Informasi

Pasar Modal dalam buku *Indonesian Capital Market Directory* yang dikeluarkan oleh *Institut for Economic and Reseach* 2010.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010 yang dapat dilihat dalam laporan keuangan dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebagai berikut: Total aset, *Leverage*, dan Jenis industri.

E. Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian adalah karakteristik yang nilai datanya bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*. Ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* adalah seberapa taat para emiten dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan

menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal (Pasal 1 angka 6 UU No.8/1995) dalam Aritonang (2008).

Meskipun kepatuhan emiten terhadap Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan keputusan Direksi Bursa Jakarta Nomor: Kep-339/BEJ/07-2001 butir C berkaitan dengan pembentukan dewan komisaris dan komite audit bisa dibagi menjadi tujuh kategori, namun tujuh kategori tersebut dapat dibagi dalam dua kategori besar, yaitu emiten-emiten yang taat terhadap peraturan *board governance* dengan yang tidak taat. Alasan lain adalah untuk menghindari jumlah kategori yang terlalu banyak, dimana terlalu banyak kategori bisa membuat hasil perhitungan yang kacau. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua kategori tersebut sebagai variabel yang akan diteliti yaitu hanya melihat kepada keberadaan komisaris independen dan komite audit. Alasannya adalah karena keduanya adalah komponen pokok untuk *board governance* sesuai dengan Kep-399/BEJ/07 2001 butir C mengenai *board governance* (Nuryanah 2004). Kategori ketaatan emiten, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kategori Ketaatan Emiten (Y)

Kategori	Komisaris Independen	Komite Audit
Memenuhi ketentuan	Memenuhi ketentuan	Memenuhi ketentuan
Belum atau tidak memenuhi ketentuan	Memenuhi ketentuan	Tidak memenuhi ketentuan
	Tidak memenuhi ketentuan	Memenuhi ketentuan
	Tidak memenuhi ketentuan	Tidak memenuhi ketentuan

Berdasarkan pada tabel 3.2. maka dapat dijelaskan bahwa apabila laporan keuangan perusahaan komisaris independennya memenuhi ketentuan dan komite audit memenuhi ketentuan maka kategori ketaatan emiten dikatakan memenuhi ketentuan, sedangkan apabila salah satunya tidak memenuhi ketentuan maka kategori ketaatan emiten dikatakan tidak atau belum memenuhi ketentuan *board governance*.

Penentuan nilai untuk kategori tersebut adalah sebagai berikut:

- a. $Y = 0$ adalah untuk kategori emiten yang belum memenuhi ketentuan baik yang berkaitan dengan komisaris independen maupun komite audit.
- b. $Y = 1$ adalah untuk kategori emiten yang komisaris independen dan komite auditnya sesuai dengan ketentuan.

2. Variabel Independen

Variabel independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah besarnya aset, *leverage*, dan jenis industri.

1. Besarnya Aset (X_1)

Menurut PSAK No.19 Tahun 2009 aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan manfaat ekonomis dimasa depan dari aset tersebut diharapkan diterima oleh entitas.

Berdasarkan penelitian Nuryanah, 2004 besarnya aset dapat diukur dengan mengelompokan aset menjadi dua kategori yaitu:

- a. Emiten beraset besar, dengan kriteria: jumlah aset \geq rata-rata aset emiten-emiten yang terdaftar di BEI berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* per 31 Desember 2010.
- b. Emiten beraset kecil, dengan kriteria: jumlah aset \leq rata-rata aset emiten-emiten yang terdaftar di BEI berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* per 31 Desember 2010.

Pada penelitian ini rata-rata aset emiten yang terdaftar di BEI berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* per 31 Desember 2010 adalah sebesar 19.606.566.438.554 (Lampiran B).

Sehingga variabel berdasarkan besarnya aset dibentuk menjadi variabel *dummy* sebagai berikut:

Tabel 3.3. Kategori Aset Emiten (X_1)

Size	Variabel <i>dummy</i>
Emiten beraset besar	1
Emiten beraset kecil	0

Untuk emiten beraset besar diberikan nilai angka 1 karena emiten beraset besar memiliki probabilitas untuk menerapkan aturan *board governance* lebih tinggi dibanding emiten beraset kecil. semakin besar aset perusahaan berarti semakin besar nama dan ukuran perusahaan tersebut, sehingga cenderung menjaga citra perusahaannya dimata publik dan hal tersebut akan membuat perusahaan semakin taat terhadap peraturan *board governance*, sehingga implementasi *good corporate governance* pada perusahaan semakin baik, dan hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modal.

2. *Leverage* (X₂)

Leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajiban dengan ekuitasnya.

Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio total utang terhadap total aktiva. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{\text{hutang}}{\text{aktiva}}$$

Dimana:

leverage : Pengungkit

utang : Total utang pada tahun t

total aktiva : Total aktiva pada tahun t

Untuk membedakan antara perusahaan *leverage* tinggi dengan perusahaan *leverage* rendah, variabel *leverage* dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:

- a. Emiten dengan *leverage* rendah, dengan kriteria: rasio *leverage* \leq rata-rata rasio *leverage* emiten-emiten yang terdaftar di BEI berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* per 31 Desember 2010.
- b. Emiten dengan *leverage* tinggi, dengan kriteria: rasio *leverage* \geq rata-rata rasio *leverage* emiten- emiten yang terdaftar di BEI berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* per 31 Desember 2010.

Pada penelitian ini rata-rata rasio *leverage* emiten yang terdaftar di BEI berdasarkan *Indonesian Capital Market Directory* per 31 Desember 2010 adalah sebesar 0,63 (Lampiran C).

Berdasarkan kategori diatas variabel *leverage* dibentuk menjadi variabel *dummy* sebagai berikut:

Tabel 3.4. Kategori *Leverage* Emiten (X_2)

<i>Leverage</i>	Variabel <i>dummy</i>
Emiten dengan <i>leverage</i> rendah	1
Emiten dengan <i>leverage</i> tinggi	0

Untuk emiten dengan *leverage* rendah diberikan angka 1 karena emiten dengan *leverage* rendah lebih cenderung mentaati aturan *board governance* dibandingkan emiten dengan *leverage* tinggi karena perusahaan dengan *leverage* yang tinggi dihadapkan pada kewajiban membayar kewajiban-kewajiban tetapnya (*fixed payment obligation*).

3. Jenis Industri (X_3)

Jenis industri adalah keragaman jenis industri perusahaan tersebut. Jenis Industri Perusahaan dikelompokkan menjadi dua kategori.

- a. Industri bank, lembaga kredit lainnya selain bank, dan asuransi.
- b. Industri lainnya.

Berdasarkan penelitian Nuryanah, 2004 variabel jenis industri perusahaan menjadi variabel *dummy*. Alasannya adalah untuk membedakan antara karakteristik bank dengan perusahaan non bank. Kategorinya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.5. Kategori Jenis Industri Emiten (X₃)

Jenis Industri	Variabel <i>dummy</i>
Industri bank, lembaga kredit lainnya selain bank, dan asuransi	1
Industri lainnya	0

Untuk industri bank, lembaga kredit dan lainnya selain bank, dan asuransi diberikan nilai 1 karena sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa dibutuhkan kredibilitas atau kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat untuk memilih perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan cenderung lebih taat dalam menaati aturan *board governance* maka diberikan angka 1.

Dengan demikian model penelitian yang digunakan untuk menganalisis besarnya aset, *leverage*, dan jenis industri dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan *Logistic Regression*. Alasan digunakannya analisis dengan regresi logistik adalah karena variabel dependen pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy* maka alat analisis yang sesuai adalah regresi logistik (Ghozali, 2006). Adapun persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{Y}{1-Y}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

$\ln\left(\frac{Y}{1-Y}\right)$ = Log *odd ratio* untuk kecenderungan perusahaan menerapkan aturan *board governance*.

β_0 = Konstanta

β_1 x1 = Koefisien regresi variabel *dummy* untuk aset

β_2 x2 = Koefisien regresi variabel *dummy* untuk *leverage*

β_3 x3 = Koefisien regresi variabel *dummy* untuk jenis industri

ε = *Disturbance error*

F. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian data secara statistik deskriptif, adapun pengujian statistik deskriptif di sini hanya melihat pada nilai frekuensi yang diperoleh dari pengujian data secara statistik deskriptif. Karena variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki skala nominal, yang merupakan skala pengukuran kategori atau kelompok. Dimana angka tersebut hanya berfungsi sebagai label kategori semata tanpa nilai intrinsik. Oleh sebab itu tidaklah tepat menghitung nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari variabel tersebut (Ghozali, 2005).

2. Logistik Regression

a. Pengujian Kelayakan Model Regresi

Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan *Goodness of fit test* yang diukur dengan nilai *Chi-square* pada bagian bawah uji *Hosmer dan Lemeshow*. Apabila nilai *Chi-square* > alpha () 0,05 maka model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Model Klasifikasi

Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

c. Menilai Model Fit

Pengujian model *fit* dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (*Block Mumber=0*) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (*Block Mumber=1*). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (*initial -2LL function*) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

3. Uji Hipotesis

Pada penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien regresi yang digunakan untuk melihat signifikan hipotesis yang diuji terhadap α () 0,05. Apabila nilai $p \text{ value} < \alpha$ () maka hipotesis diterima, artinya besarnya aset, *leverage*, dan jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Dalam bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul dari berbagai sumber yang ada, maka dilakukan pengolahan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga (3) variabel independen yang meliputi: aset, *leverage*, jenis industri. Data dari ketiga variabel independen diperoleh sesuai dengan cara-cara pengambilan data penelitian terdahulu.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* 190 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan teori yang telah dikemukakan, dalam bab ini dapat dianalisis sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu.

Secara keseluruhan, data mengenai variabel dependen dan ketiga variabel independen dari 190 perusahaan sampel tersebut dapat dilihat di lampiran (Lampiran B,C,D,E). Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis *regresi logistic*. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan komputer melalui program *Excel* dan *SPSS for Windows*. Ringkasan hasil olahan data seluruh variabel penelitian yang telah diolah dengan bantuan program *SPSS for Windows* akan dipaparkan hasil regresi dari penelitian sebagai berikut.

2. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum sampel dengan variabel aset, *leverage*, jenis industri dan ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* yang dapat dilihat pada tabel frekuensi berikut ini:

Tabel 4.1. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan Aset

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	171	90.0	90.0	90.0
1	19	10.0	10.0	100.0
Total	190	100.0	100.0	

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Untuk perusahaan kategori aset kecil diberi kode (0) sedangkan untuk perusahaan kategori aset besar diberi kode (1). Berdasarkan tabel frekuensi yang dihasilkan, untuk perusahaan yang memiliki kategori aset kecil ada 171 perusahaan (90,0%) dan 19 perusahaan (10,0%) termasuk dalam kategori aset besar dari 190 perusahaan sampel penelitian.

Tabel 4.2. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan *Leverage*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	27	14.2	14.2	14.2
1	163	85.8	85.8	100.0
Total	190	100.0	100.0	

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Untuk perusahaan kategori *leverage* tinggi diberi kode (0) sedangkan untuk perusahaan kategori *leverage* rendah diberi kode (1). Berdasarkan tabel frekuensi yang dihasilkan, untuk perusahaan yang memiliki kategori *leverage* tinggi ada 27 perusahaan (14,2%) dan 163 perusahaan (85,8%) termasuk dalam kategori *leverage* rendah dari 190 perusahaan sampel penelitian.

Tabel 4.3. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan Jenis Industri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	143	75.3	75.3	75.3
1	47	24.7	24.7	100.0
Total	190	100.0	100.0	

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Untuk jenis industri selain bank, lembaga kredit dan asuransi diberi kode (0) sedangkan untuk jenis industri bank, lembaga kredit dan asuransi diberi kode (1). Berdasarkan tabel frekuensi yang dihasilkan, untuk jenis industri bank, lembaga kredit dan asuransi ada 47 perusahaan (24,7%) dan sisanya 75,3% (143 perusahaan) termasuk dalam industri lainnya, terutama manufaktur dari 190 perusahaan sampel penelitian.

Tabel 4.4. Frekuensi (Jumlah) Berdasarkan *Board Governance*

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	102	53.7	53.7	53.7
1	88	46.3	46.3	100.0
Total	190	100.0	100.0	

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Untuk kategori emiten yang belum memenuhi ketentuan baik yang berkaitan dengan komisaris independen maupun komite audit diberi kode (0) sedangkan untuk kategori emiten yang komisaris independen dan komite auditnya sesuai dengan ketentuan diberi kode (1). Berdasarkan tabel frekuensi yang dihasilkan, untuk ketaatan dalam menerapkan aturan *board governance*, ada 88 perusahaan (46,3%) yang telah memenuhi ketentuan berkaitan dengan komisaris independen dan komite audit, sedangkan sisanya 102 perusahaan (53,7%) belum memenuhi ketentuan *board governance* atau tidak memenuhi keberadaan salah satu dari komisaris independen dan atau komite audit, atau keduanya.

3. Regresi Logistik

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. Dari tampilan tabel *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test* sebesar 2,014 dengan probabilitas signifikansi 0,569 yang nilainya lebih besar daripada (0,05) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 4.5. *Hosmer dan Lomeshow's Goodness of Fit Test*

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	2.014	3	.569

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Untuk memperjelas gambaran penjelasan kekuatan prediksi dari model regresi logistik untuk memprediksi ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* dapat dilihat pada tabel klasifikasi sebagai berikut:

Tabel.4.6.Tabel Klasifikasi

Observed		Predicted		
		Board_Governance		Percentage Correct
		0	1	
Step 1 Board_Governance	0	83	19	81.4
	1	53	35	39.8
Overall Percentage				62.1

a. The cut value is ,500

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Tabel klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa dari 102 perusahaan yang termasuk tidak taat dalam menerapkan aturan *board governance*, sebanyak 83 perusahaan atau 81,4% yang secara tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini sebagai perusahaan yang termasuk tidak taat dalam menerapkan aturan *board governance*. Sedangkan dari 88 perusahaan yang termasuk taat dalam menerapkan aturan *board governance*, sebanyak 53 perusahaan atau (39,8%) dengan tepat dapat diprediksikan oleh model regresi logistik ini sebagai perusahaan yang termasuk taat dalam menerapkan aturan *board governance*. Dengan demikian secara keseluruhan dari 190 sampel perusahaan hanya 62,1% yang dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini.

Kemudian langkah selanjutnya adalah menilai model fit dengan menggunakan -2log likelihood yang dapat dilihat pada tabel.4.8 berikut:

Tabel.4.7. Tabel *Iteration History -2 Log Likelihood*

Iteration		-2 Log Likelihood
Step 0	1	262.363
Step 1	2	248.830
Step 1	3	248.829
Step 1	4	248.829

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik -2 Log Likelihood pada awal (*Block Number=0*) yaitu tanpa variabel hanya konstanta saja sebesar 262,363 setelah dimasukkannya 3 variabel maka nilai -2 Log Likelihood turun menjadi 248,829 dan setelah semua variabel dimasukkan menjadi 248,829. Artinya menunjukkan terjadinya penurunan nilai -2 Log Likelihood di *block 0* dan *block 1* sebesar 13,534. Hal ini berarti penambahan variabel independen (*Aset, leverage, dan Jenis industri*) dapat digunakan.

4. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan uji signifikansi, yaitu uji koefisien regresi. Hasil pengujian koefisien regresi tersebut dapat dilihat pada tabel.4.10 berikut:

Tabel.4.8.Uji Koefisien Regresi*Variables in the Equation*

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a Aset	1.357	.607	4.991	1	.025	3.885
Leverage	.077	.455	.028	1	.866	1.080
Jenis_Industri	.736	.365	4.067	1	.044	2.088
Constant	.516	.444	1.355	1	.244	.597

a. Variable(s) entered on step 1: Aset, Leverage, Jenis_Industri.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2012)

Berdasarkan pada tabel.4.8. uji koefisien regresi diatas didapati persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{y}{1-y}\right) = 0,516 + 1,357X_1 + 0,077X_2 + 0,736X_3$$

Penjelasan:

1. Konstanta sebesar 0,516 menyatakan bahwa jika variabel independen bernilai nol maka variabel dependen adalah sebesar 0,516.
2. Nilai $\beta_1 = 1,357$ menunjukkan bahwa apabila variabel aset mengalami kenaikan satu satuan, maka ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* akan mengalami kenaikan sebesar 1,357.
3. Nilai $\beta_2 = 0,077$ tidak menunjukkan kenaikan ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* sebesar 0,077 apabila variabel *leverage* mengalami kenaikan satu satuan. Karena *leverage* memiliki nilai p-value yang berada di atas 0,05 yang mengandung arti bahwa H_{a2} ditolak.
4. Nilai $\beta_3 = 0,763$ menunjukkan bahwa apabila variabel jenis industri mengalami kenaikan satu satuan, maka ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,763.

4.1 Hipotesis 1

Untuk menginterpretasikan data variabel aset pada tabel 4.10 kita kembali pada hipotesis pertama yang menyatakan:

H_{a1} = Besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel aset memiliki nilai p-value sebesar 0,025 dan memiliki beta dengan koefisien yang positif sebesar +1,357. Nilai p-value yang berada di bawah 0,05 mengandung arti bahwa H_{a1} diterima, dengan demikian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki total aset semakin besar akan semakin besar kecenderungannya untuk taat dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

4.2 Hipotesis 2

Untuk menginterpretasikan data variabel *leverage* pada tabel 4.10 kita kembali pada hipotesis kedua yang menyatakan:

H_{a2} = *leverage* berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel *leverage* memiliki nilai p-value sebesar 0,866 dan memiliki beta dengan koefisien yang positif sebesar +0,077. Nilai p-value yang berada di atas 0,05 mengandung arti bahwa H_{a2} ditolak, dengan demikian tidak terbukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

4.3 Hipotesis 3

Untuk menginterpretasikan data variabel jenis industri pada tabel 4.10 kita kembali pada hipotesis ketiga yang menyatakan:

H_{a3} = Jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel jenis industri memiliki nilai p-value sebesar 0,04 dan memiliki beta dengan koefisien yang positif sebesar +0,736. Nilai p-value yang berada di bawah 0,05 mengandung arti bahwa H_{a3} diterima, dengan demikian terbukti bahwa perusahaan yang memiliki jenis industri perbankan, lembaga kredit dan asuransi, akan semakin besar kecenderungannya untuk taat dalam menerapkan aturan *Board Governance*.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan uji hipotesis dimana nilai signifikansi aset sebesar 0,025 dan nilai koefisien regresi adalah positif sebesar +1,357 pada taraf signifikansi 5% (0,05), yang berarti nilai $0,025 < 0,05$.

Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis pertama (H_{a1}) yang menyatakan bahwa besarnya aset berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Hal ini disebabkan karena dengan adanya aset yang semakin besar maka perusahaan cenderung telah berskala besar sehingga akan memiliki ketaatan yang semakin besar dalam menerapkan aturan *board governance*. Karena perusahaan yang berskala besar lebih menjaga nama dan citranya dimata publik untuk menarik para investor dalam menginvestasikan sahamnya pada perusahaan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nuryanah (2004) yang menganalisis hubungan *board governance* dengan penciptaan nilai perusahaan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ), bahwa besar kecilnya aset perusahaan akan berbeda responsivitasnya terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan uji hipotesis dimana nilai signifikansi *leverage* sebesar 0,866 dan nilai koefisien regresi adalah positif sebesar +0,077 pada taraf signifikansi 5% (0,05), yang berarti nilai $0,866 > 0,05$.

Dengan demikian penelitian ini menolak hipotesis kedua (H_{a2}) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Hal ini disebabkan karena periode penelitian sedang terjadi krisis global, dimana mayoritas perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedang mengalami kesulitan untuk pendanaan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga untuk menjaga sumber daya tersebut, perusahaan mengambil kebijakan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pihak ketiga yang mengakibatkan rasio *leverage* meningkat lebih tinggi. Menurut Blackdkk (2003), semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung untuk mengabaikan praktik *corporate governance*, dan lebih memperhatikan kontrak hutang dengan pihak kreditur. Terlebih lagi aturan tentang praktik *corporate governance* tersebut hanya bersifat himbauan, dan tanpa adanya sanksi yang tegas dari pihak regulator.

3. Jenis Industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel jenis industri perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*. Hal ini dapat terlihat dari perhitungan uji hipotesis dimana nilai signifikansi jenis industri sebesar 0,04 dan nilai koefisien regresi adalah positif sebesar +0,736 pada taraf signifikansi 5% (0,05), yang berarti nilai $0,04 < 0,05$.

Dengan demikian penelitian ini menerima hipotesis ketiga (H_{a3}) yang menyatakan bahwa jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

Hal ini disebabkan karena perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa seperti industri bank, lembaga kredit lainnya selain bank, dan asuransi lebih membutuhkan kredibilitas atau kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat, sehingga perusahaan tersebut akan berusaha untuk semakin taat dalam menerapkan aturan *board governance* dalam rangka menarik minat investor dalam berinvestasi dan untuk memilih perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Augustine dan Amelinda (2005) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta tentang ketaatan emiten terhadap aturan *board governance* yang menyatakan bahwa jenis industri perusahaan mempengaruhi ketaatan emiten dalam mentaati aturan *board governance*.

BAB V

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan disampaikan kesimpulan, dan saran mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan dan saran yang disampaikan didasarkan pada hasil penelitian ini, khususnya dari hasil pengujian hipotesis. Kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti besarnya aset, *leverage*, dan jenis industri terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2010 dengan sampel penelitian sebanyak 190 perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga (3) yaitu aset, *leverage*, jenis industri. Sedangkan variabel dependennya adalah ketaatan emiten.

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya aset perusahaan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.
2. *Leverage* perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.
3. Jenis industri berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.

B. Saran

Setelah melakukan analisis pada penelitian ini, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang yang sama dapat menggunakan dan menambahkan variabel-variabel independen lain yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan periode pengamatan tahun 2010, oleh karena itu bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan data yang lebih banyak dengan memperpanjang periode penelitian.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain dan berikutnya yang akan meneliti tentang ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* di Bursa Efek Indonesia.
4. Penelitian ini sekiranya dapat memberikan kontribusi dan gambaran bagi pihak regulator dan investor tentang ketaatan emiten dalam menerapkan aturan *board governance* di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Pramuka Bambang dan Muh.Arief Ujiyantho. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30.
- Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 59.
- Anthony, R.N dan Govindarajan., 2005, *Management Control System*, Salemba Empat, Jakarta.
- Aritonang, Maria Imelda. 2008. *Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi Di Pasar Modal*, Semarang: Universitas Diponogoro.
- Augustine, Yvvoe dan Adele Tiara Amelida. 2005. *Analisa Responsivitas Ketaatan Emiten Terhadap Aturan Board Governance pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Pada Tahun 2003*. Makalah Konfrensi Nasional Akuntansi.
- Darmawati. 2004. *Hubungan Corporate Governance Dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.
- FCGI. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan). Jilid II, Edisi 2.
- Fitria, Farahnazl Annisa. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Emiten Terhadap Aturan Board Governance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hastuti, Dwi Theresia. 2005. *Hubungan Antara Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan: Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Jakarta*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.

- Husnan, Suad. 2001. *Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan: Perbandingan Kinerja Perusahaan Dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Multinasional dan Bukan Multinasional* Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Vol. 1 No.1. Februari 2001:1-12.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. ED PSAK No. 19 revisi 2009 Aset Tidak Berwujud, Staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/. Diakses tanggal 14 Mei 2012.
- Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto LS. 2005. *Corporate Governance Dan Kinerja: Analisis Pengaruh Compliance Reporting Dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Ningsaptiti Restie. 2010. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Nuryanah, Siti. 2004. *Analisa Ketaatan Emiten Terhadap Aturan Board Governance: Studi Kasus Tahun 2002*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi VII Bali.
- Rika Susanti. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Listed Tahun 2005-2008)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Rudi Isnanta.2008. *Pengaruh Corporate Governance dan Stuktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 4004-2007*. Semarang ; Universitas Diponegoro.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Surya Indra, Yustiavandana Ivan, 2008, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Kencana.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.

Syahroza, Akhmad. 2003. Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia. *Usahawan No. 06 THXXXII*.

Syamsuddin, Lukman, 2004, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyudi, Sugeng, 2005, *Komitmen dan Kinerja Perusahaan*, Suara Merdeka Senin 14 Maret 2005.

Widyaningdyah A.U. (2001). "*Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earning Management Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia*". Jurnal Akuntansi & Keuangan, Vol. 3, No. 2, h. 89-101.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Tentang Perindustrian.